

KONSEP KERUKUNAN MASYARAKAT MULTIKUTURAL KABUPATEN BANYUWANGI

M. Syamsudini

Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Jember

Abstract

This research is conducted in Banyuwangi and is qualitative in nature by means of social and phenomenological approach, and thus the data collection methods used is more qualitative. However, from the characteristics of the research it is a survey and the approach is a case study i.e. a research which is conducted intensively, detailed, and deeply about an organization or something that possibly happens.

The research findings show that: (1) the portraits of society and culture of the people of Banyuwangi is a multi-cultural community comprises of various ethnics, tribes, faith, groups etc. The combination of this multi-culture society could happen in the central town or in the suburb and even in the remote area. And the interaction among Javanese, Madurese, Balinese, Osing, Arabs, Chinese, Mandar, Malay, and others emerges a unique characteristic, (2) local wisdom of the people of Banyuwangi emerges a social phenomenon about democratic values, this can be seen from the tradition of the people of Banyuwangi, (3) the efforts to deal with livin

Kata Kunci : Konsep kerukunan masyarakat multikultural dan Banyuwangi

LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir ini banyak wilayah di Indonesia muncul berbagai kerusuhan sosial berlatar belakang permasalahan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang sangat potensial mengancam integrasi bangsa. Kehidupan masyarakat yang semula berjalan rukun dan harmonis, kini porak poranda akibat kerusuhan tersebut yang menelan korban harta dan jiwa yang tak terbilang jumlahnya. Di negara kita, pernah terjadi serentetan kerusuhan yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), misalnya saja yang pernah terjadi di Banyuwangi, Sampit, Sambas, Maluku, Poso, Tasikmalaya, Kupang, Sampang, dan sebagainya yang hingga saat ini kadang-kadang juga muncul berbagai isu yang berkembang tentang sebab terjadinya huru-hara tersebut sangat

variatif, misalnya mulai perebutan jabatan di pemerintahan, perebutan wilayah yang potensial dan adanya polarisasi sosial-ekonomi.

Dengan keragaman potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kearifan-kearifan lokal tidak boleh ditinggalkan. Sebab bangsa Indonesia dikenal dengan sifat dan sikap dasarnya yang santun, ramah-tamah, suka tolong menolong, dan bergotong royong. Kearifan-kearifan inilah yang mestinya di jadikan media dalam membangun kerukunan masyarakat multikultural. Persoalannya adalah mengapa kearifan-kearifan lokal tersebut selama ini justru diabaikan dan sudah tidak diperlukan lagi? Apakah kearifan lokal tersebut telah terkikis habis oleh roda globalisasi yang sudah tidak terbendung? Ataukah memang disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial di tengah arus globalisasi?

Multikulturalitas dalam masyarakat, merupakan suatu realitas obyektif (*sunnatullah*) yang tidak bisa dihindari ataupun ditolak oleh siapapun. Karenanya, keanekaragaman masyarakat sebetulnya bukan berarti menjadi sumber konflik dan permusuhan, melainkan sebagai suatu kenyataan yang harus diterima oleh semua pihak dengan selalu memberi respek yang baik bagi orang lain. Berdasarkan pentingnya memberikan respek terhadap orang lain dalam koridor masyarakat multikultural ini, maka perlu dilakukan penelitian tentang "Konsep Kerukunan Masyarakat Multikultural Kabupaten Banyuwangi".

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah "Kerukunan Masyarakat Multikultural", kearifan – kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam membangun *mutual understanding* di tengah keberagaman dan keberagaman umat", yang dibatasi pada aspek-aspek mendasar, yaitu: (1) Konsep Kerukunan Masyarakat Multikultural yang dipahami masyarakat dan pelaksanaannya. (2) Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam memecahkan problematika kerukunan masyarakat multikultural. (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam menciptakan kerukunan masyarakat multikultural.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah pendekatan kualitatif sosiologis-fenomenologis, karena itu data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data-data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka (Robert L, 1982 : 2). Pendekatan fenomenologis, yaitu obyek penelitian didekati dengan hal-hal yang empirik. Fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya dalam situasi

tertentu (Robert L, 1982 : 12). Penelitian kualitatif juga ditandai dengan penggunaan metode pengumpulan data yang berupa *partisipant observation* dan *independent interview* sebagai metode pengumpulan data yang utama, sehingga penelitian kualitatif cenderung meneliti karakteristik, antara lain memiliki instrumen kunci, lebih memperhatikan proses dari pada produk, dan cenderung menganalisa secara empiris, dan ini merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif (Suharsini Arikunto, 1996 : 9).

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kerukunan masyarakat multikultur (melacak kearifan lokal demi terwujudnya *mutual understanding* di tengah keberagaman masyarakat) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan mengambil berbagai informan yang terdiri dari tokoh masyarakat adat, tokoh muda, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian. Pengambilan subyek penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan tidak didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi di dasarkan atas tujuan yang sudah direncanakan dan ditentukan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *secunder*. Data *primer* diambil melalui tehnik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur dan semi terbuka. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka langsung agar setiap pertanyaan semi terbuka dapat disampaikan dan memperoleh jawaban atau data secara langsung.

b. Observasi

Yaitu kegiatan untuk mengamati gejala-gejala obyektif yang terkait langsung dengan variabel penelitian, di mana peneliti terlibat langsung dalam pengamatan tersebut. Metode ini digunakan peneliti untuk mengamati pola-pola kerukunan masyarakat multikultural yang telah terbangun di Banyuwangi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi akan dipergunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data tentang proses perkembangan kerukunan masyarakat multikultural di Banyuwangi, sehingga terjalin *mutual understanding* di tengah-tengah komunitasnya.

d. Analisis Data

Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu; Reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi (Mathew B Miles, 1984 : 21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi**

Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur, wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Banyuwangi merupakan daerah perbatasan wilayah Jawa dan Bali yang dua daerah ini terkenal dengan daerah yang kaya akan kultur dan budaya masyarakatnya. Di daerah Jawa ada kerajaan Hindu Majapahit yang saat itu sangat kuat pengaruh dan wilayah kekuasaannya sementara di Daerah Bali juga berdiri beberapa kerajaan Hindu yang juga punya kekuasaan di seantero Bali, kerajaan – kerajaan itu antara lain kerajaan Klungkung (derah Timur), kerajaan Mengwi (daerah Tengah) dan kerajaan Jemberana (daerah Barat). Dengan adanya dua pertemuan kultur budaya antara Jawa dan Bali ini, menjadikan tradisi dan budaya Banyuwangi sangat hiruk pikuk dengan berbagai macam kegiatan kebudayaan (Hasil wawancara dengan Bisri Efendi, LIPI Jakarta). Bukti bahwa tradisi dan budaya sangat beranekaragam adalah dengan terbentuknya berbagai macam perkampungan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Perkampungan ini terbentuk karena adanya persamaan nasib yang dialami oleh berbagai suku yang singgah dan di impor oleh penjajah Belanda ke Kabupaten Banyuwangi. Kampung – kampung itu antara lain : Kampung Bali (yang penduduknya kebanyakan orang Bali dan bermasyarakat Hindu), Kampung Madura (mayoritas Madura), Kampung Melayu (masyarakat Sumatera), Kampung Mandar (masyarakat Sulawesi), Kampung Arab (masyarakat Arab), kampung

Inggris/Inggrisan, kampung Ujung, Kampung Jawa Tengah (orang Banyuwangi menyebutnya dengan *kampung wong kulon*) (Hasil wawancara dengan Ayu Sutarto, Unej).

Banyaknya etnis, suku, golongan, kelompok dan aliran yang ada di Banyuwangi, menunjukkan bahwa daerah ini memang sangat ramai dengan pergesekan budaya dan tradisi yang pada akhirnya memunculkan budaya baru. Salah satu suku tertua di daerah Jawa ada di daerah Banyuwangi ini yaitu suku Sangkan Paran. Pendiri dari suku ini adalah Raden Joyokusumo, ia dikabarkan mempunyai hubungan dengan kraton Solo, sebagaimana tergambar dari gelar para pemimpin suku ini dengan gelar susuhunan yang nota bene golongan bangsawan kraton Solo. Data detail tentang suku Sangkan Paran ini tidak terdeteksi, satu-satunya fakta konvensional bahwa Sangkan Paran telah terdaftar secara resmi tahun 1912, dan pendirinya tinggal di Jati sebuah desa kecil di daerah perkebunan Banyuwangi Barat (Andrew Betty, tt : 261).

B. Konsepsi Kerukunan Masyarakat Multikultural Perspektif Masyarakat Banyuwangi

Dalam konteks sosio-politik, Banyuwangi sering dianggap sebagai wilayah yang rawan konflik. Hal ini dikarenakan ada sebuah peristiwa yang menjadikan pembenaran justifikasi tersebut yaitu: Aksi pembantaian dengan isu ninja pada tahun 1998. Peristiwa tersebut secara langsung mencitrakan wilayah ini beserta komunitas pendukungnya sebagai wilayah yang mudah berkonflik. Tentu saja asumsi tersebut tidak selamanya benar, karena pada dasarnya peristiwa ninja tidak hanya menjadi karakteristik masyarakat di wilayah ini dan ada latar belakang serta setting politik yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Di samping itu peran media yang selama ini mem-blow up peristiwa ninja di wilayah ini juga menjadi penguat stereotip tersebut. Padahal dalam hal kebudayaan, masyarakat di wilayah Banyuwangi mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri. Keunikan dan karakteristik masyarakat Banyuwangi dalam konteks wacana kebudayaan merupakan tema baru dan belum banyak mendapat perhatian serius dari para pakar budaya. Kenyataan tersebut memang bisa dimaklumi, karena dalam konteks wilayah kebudayaan dan geografis, Banyuwangi memang berada pada 'ruang lain kebudayaan'. Mengapa

dikatakan demikian? Dari sisi posisi dan wilayah, Banyuwangi hanya merupakan satu wilayah kebudayaan (*cultural area*) di bagian timur Provinsi Jawa Timur dan jauh dari pusat informasi sehingga menjadikannya sebagai 'liyan' (*the other*) yang kurang diminati. Tetapi, benarkah 'posisi pinggir' dalam konteks diskursus budaya tersebut menjadikan Banyuwangi kurang menarik untuk dijadikan kajian akademis?

Potret sosio-kultural masyarakat yang mendiami wilayah Banyuwangi adalah kombinasi masyarakat saling berinteraksi dengan banyak etnis, suku, golongan, masyarakat, aliran, kelompok dan seterusnya yang pada akhirnya melahirkan masyarakat multikultur. Perpaduan dan adaptasi budaya ini memang terjadi meskipun lebih banyak berlangsung di pusat dan pinggiran kota. Di Kecamatan Banyuwangi Kota, misalnya, interaksi antara warga Madura, Bali, Cina, Arab, Mandar, Melayu, Jawa dan Osing melahirkan sebuah kerukunan yang mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri.

Dalam konteks kesenian, juga terjadi proses perpaduan dan, lagi-lagi, lebih cenderung berorientasi pada kesenian berakar dari budaya campuran. Di Alian, Kecamatan Rogojampi, misalnya, ada kelompok "*Hadrah Kuntul*" yang dalam pertunjukannya menggunakan Bahasa Arab yang komunitas penontonnya berasal dari etnis Osing, Bali, Cina, Madura dan Jawa. Pada umumnya, budaya Banyuwangi merupakan hasil dari suatu proses sosial panjang dan dialog intensif di antara bermacam-macam kebudayaan sejalan dengan masyarakat pendukungnya.

Pendekatan multikultural akan menjadi alat bantu dalam menganalisis perkembangan masyarakat Banyuwangi dewasa ini. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan kajian yang lebih komperhensif tentang bagaimana kondisi, peran, kontestasi, dan beragam kebudayaan dan masyarakat pendukungnya. Membicarakan Kerukunan masyarakat Banyuwangi dalam konteks yang lebih luas, tentu tidak bisa menegaskan keberadaan etnis lain, selain Jawa, Osing dan Madura. Tionghoa, Arab, Mandar, Melayu dan Bali, meskipun dianggap sebagai minoritas, mereka juga ikut berpartisipasi dalam proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dan hal itu tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Di Kecamatan Glenmore, misalnya, sejak migrasi era kolonial sebagai bentuk mobilisasi massa oleh pihak kolonial (dalam hal ini Belanda) telah menghasilkan struktur masyarakat multi-etnis.

Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, sebuah proses budaya dalam masyarakat secara kontinyu berlangsung dalam nuansa damai. Mereka saling berinteraksi dan beradaptasi untuk saling melengkapi berdasarkan peran masing-masing. Etnis Tionghoa dan Arab, misalnya, berperan sebagai pedagang. Etnis Madura lebih banyak berperan sebagai pekerja kebun dan petani serta sebagian kecil berperan dalam dunia pendidikan pesantren sebagai kyai dan ustadz. Sementara etnis Jawa dan Osing mengambil peran sebagai petani, pendidik (formal), dan aparat birokrasi. Meskipun saat ini peran tersebut sudah ada yang berubah, tetapi secara umum bisa dikatakan tetap.

Pola interaksi dan adaptasi antarbudaya sebagai konsekuensi proses komunikasi antar etnis, tidak bisa dipungkiri, telah melahirkan sebuah varian budaya baru bernuansa hibrid yang kemudian disebut masyarakat multikultur. Lahirnya Masyarakat multikultur merupakan proses interaksi dan komunikasi di antara beragam etnis yang berakar dari peran sosial dan atraksi kultural masing-masing yang kemudian menghasilkan budaya kolaborasi.

Kolaborasi dalam konteks masyarakat Banyuwangi ini tidak hanya membicarakan proses perpaduan antara bermacam budaya yang menghasilkan budaya baru. Kolaborasi yang terjadi di wilayah Banyuwangi merupakan kolaborasi struktural dan kolaborasi kultural.

Dalam kolaborasi struktural masyarakat Banyuwangi yang multietnik, telah terjadi persilangan peran sosial terutama dalam pilihan organisasi sebagai akibat dari saling berinteraksinya budaya mereka. Saat ini, misalnya, sudah banyak warga etnik Madura yang memilih untuk menjadi pegawai pemerintah maupun pendidik formal sehingga bukan lagi menjadi dominasi etnis Jawa dan Osing. Sedangkan kolaborasi kultural yang terjadi pada masyarakat Banyuwangi merupakan percampuran bermacam bahasa dan tradisi multietnik yang membentuk 'budaya baru' meskipun tidak selamanya baru. Budaya baru tersebut berbentuk, misalnya, Bahasa Osing sering digunakan bahasa komunikasi di Kampung Arab yang mayoritas penduduknya etnis Arab. Contoh lain Etnis Tionghoa, terutama dalam transaksi dagang, banyak berinteraksi dengan menggunakan Bahasa Madura maupun Bahasa Jawa bercampur logat Tionghoa yang cukup kental. Begitu pula dengan etnis Bali. Di kecamatan seperti Rogojampi, kita bisa menjumpai perkampungan Bali

di mana warganya banyak yang berkomunikasi dengan Bahasa Osing bercampur logat Bahasa Bali.

Sedangkan dalam tradisi kesenian juga terjadi keterlibatan lintas-etnis dalam kesenian Tionghoa dan Arab, tetapi tanpa merubah format pertunjukan maupun bahasanya. Dalam kesenian Barongsai dan Liang liong Muncar, misalnya, banyak anggota -baik penari maupun pemusiknya- yang berasal dari etnis Madura maupun Jawa. Begitupula yang terjadi dengan penggarapan kesenian Gambus (Arab), Kendang Kempul dan Janger (Osing) yang juga melibatkan etnik Madura dan Jawa. Di sini tampak jelas, meskipun telah terjadi kolaborasi, namun di Banyuwangi tetap belum menghasilkan 'sesuatu yang sepenuhnya baru'. Dengan kata lain ada kesadaran dan kemauan personal untuk berpartisipasi ke dalam kelompok kesenian etnis lain ---baik karena motivasi ekonomi ataupun kesadaran budaya--- dan tidak berarti mereka kehilangan jati diri budaya etnis asal mereka.

Membicarakan masyarakat Banyuwangi sebagai proses perpaduan, secara otomatis juga membicarakan masyarakat Banyuwangi dalam konteks masyarakat multikultural. Mengapa demikian? Karena di samping ditemukannya data tentang perpaduan yang menghasilkan sebuah budaya baru, di wilayah kebudayaan ini juga bisa dilihat adanya budaya masing-masing etnis yang tetap dipertahankan dalam sebuah proses sosial yang menempati ruang dan waktu yang sama. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka berinteraksi, tetapi mereka tetap kukuh dalam menjalankan aktivitas budaya sesuai dengan identitas masing-masing demi terjaganya jati dirinya.

Di Banyuwangi, kondisi tersebut sangat tampak ketika kita melihat aktivitas budaya di wilayah selatan, utara dan Barat. Sebagai produk segregasi etnis ala kolonial, masyarakat etnis Jawa yang menempati wilayah selatan Banyuwangi (seperti Tegaldlimo, Pesanggaran, Tegalsari, Siliragung dan Gambiran) sampai saat ini masih mempraktekkan produk budaya Jawa baik dalam hal bahasa, kesenian, maupun adat-istiadat lainnya. Masyarakat Jawa di Tegalsari, misalnya, sampai saat ini masih melestarikan kesenian Reog yang berasal dari nenek moyangnya di Ponorogo. Di samping itu, hampir semua masyarakat di selatan juga menggemari Wayang Kulit, Jaranan, dan Campursari. Sedangkan untuk urusan pendidikan mereka tetap berorientasi pada pendidikan formal,

meskipun di sana juga terdapat pondok pesantren.

Disisi lain ada contoh dalam bentuk penelitian dari tulisan Beatty. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan bahwa Islam Jawa (termasuk Banyuwangi) hakikatnya adalah Islam sinkretik atau paduan antara Islam, Hindu/Budha dan kepercayaan animistik. Melalui pendekatan multivokalitas dinyatakan bahwa Islam Jawa sungguh-sungguh merupakan Islam sinkretik. Corak Islam Jawa merupakan pemaduan dari berbagai unsur yang telah menyatu sehingga tidak bisa lagi dikenali sebagai Islam. Kenyataannya Islam hanya di luarnya saja, akan tetapi intinya adalah keyakinan-keyakinan lokal. Melalui tulisannya yang bertopik *“Adam and Eva and Vishnu: Syncretism in the Javanese Slametan”* digambarkan bahwa inti masyarakat Jawa ialah slametan yang di dalamnya terlihat inti dari ritual tersebut adalah keyakinan-keyakinan lokal hasil sinkresi antara Islam, Hindu/Budha dan animisme.

Sementara di wilayah utara, masyarakat tetap bertahan pada orientasi budaya Madura. Bahasa Madura merupakan bahasa sehari-hari masyarakat di Kecamatan Giri, Kalipuro, Wongsorejo, sebagian Glagah, sebagian Licin dan sebagian Banyuwangi Kota. Di samping ludruk ala Madura, masyarakat di sana gemar melihat pertunjukan Hadrah sebagai kesenian pesantren yang menjadi orientasi pendidikan etnis Madura. Pengajian⁷ juga menjadi acara favorit karena di samping mendapatkan wejangan-wejangan tentang Islam, mereka juga bisa bertemu dengan para *Lorah* (sebutan untuk kyai) ataupun *Gus* (anak kyai) yang dianggap bisa mendatangkan berkah bagi kehidupan warga. Sedangkan di wilayah Barat dan pinggiran kota Rogojampi dan Banyuwangi Kota—di samping berdagang, etnis Tionghoa—sebagai berkah reformasi politik nasional—juga mulai mengembangkan kesenian Barongsai dan Liang liong sebagai kesenian khas mereka. Pada peringatan Imlek, kesenian ini dipertontonkan menyusuri jalan-jalan protokol kota Banyuwangi, meskipun generasi mudanya sudah banyak yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa dengan aksen Tionghoa, Bahasa Mandarin sudah mulai diperkenalkan lagi.

Dalam hal pendidikan sebagian besar warga etnis Tionghoa tetap menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang dikelola gereja, seperti SD, SMP, dan SMA Santo Yusuf, SMA Mandala, SMA Aletheia dan lain-lain. Sementara etnis Arab tetap kukuh mempertahankan

identitasnya dengan tetap melestarikan pernikahan sesama etnis. Mereka juga masih mempertahankan Musik Gambus sebagai pemenuh kebutuhan estetikanya.

Fakta-fakta di atas merupakan sisi lain Banyuwangi sebagai sebuah komunitas budaya yang selama ini hanya dianggap bercirikan perpaduan budaya Jawa, Osing, Bali dan Madura, ternyata menyimpan 'sebuah orkestra multikultural' yang berjalan dengan harmonis dan dinamis.

Meskipun seringkali dikatakan menghasilkan produk budaya yang dinamakan budaya Banyuwangi ternyata mereka tetap menikmati kesejarahan dalam bentuk pemertahanan identitas kultural etnis masing-masing. Mereka yang selama ini melangsungkan kehidupan dalam sebuah masyarakat di Banyuwangi ini berhasil mengembangkan satu bentuk masyarakat multikultural yang sangat toleran dalam menghargai perbedaan.

Orkestra multikultural dalam sebuah periuk besar bernama budaya Banyuwangi ini merupakan sisi positif dari sebuah kebermasyarakatn yang semestinya terus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Komunitas masyarakat multikultural Banyuwangi dengan segala kekurangannya telah memberikan contoh tentang bagaimana membangun kesadaran bersama dalam masyarakat multikultural. Parsudi Suparlan dalam makalahnya mengatakan: Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat Banyuwangi) dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut.

C. Kearifan Lokal Masyarakat Banyuwangi

Memasuki lebih mendalam tentang tradisi masyarakat Banyuwangi dalam membangun keakraban antar masyarakat untuk menyelesaikan problema masyarakat adalah munculnya fenomena sosiologis tentang nilai-nilai demokrasi dalam budaya Banyuwangi, hal dapat dilihat dari beberapa bentuk tradisi yang dilakukan masyarakat Banyuwangi, di antaranya:

1. Tradisi Musyawarah

Selama ini masyarakat Banyuwangi dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik politik di antara mereka. Yang paling aktual adalah konflik politik yang datangnya bertubi-tubi mulai diangkatnya Bupati Banyuwangi Soewarso Hanafi, Ir. H. Syamsul Hadi sampai diangkatnya Bupati Ratna Ani Lestari. Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan masyarakat ke dalam batas-batas objektif dan subjektif.

2. Tradisi Gotong Royong

Tradisi gotong-royong sebagai ciri demokrasi, juga hidup dalam masyarakat Banyuwangi. Ada ungkapan cukup terkenal yang menjadi pegangan hidup masyarakat Banyuwangi, *Kerjo Byareng Sampek Marai* (kerja bersama sampai tuntas) atau *Kerjo Byareng sampek Wekasane* (kerja bersama dari awal sampai akhir) atau *Dayung Byareng* (kerjasama secara serempak). Maksudnya dalam melakukan pekerjaan sampai selesai dengan bergotong-royong secara bersama-sama, rambate rata hayu, singsingkan lengan baju, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing.

3. Tradisi Persamaan

Tradisi persamaan dalam masyarakat Banyuwangi sudah terlihat pada aspek bahasa pengantar dan pergaulan hampir di seluruh pelosok kota hingga pelosok desa, sangat sederhana, bisa dikatakan hampir tidak memiliki hirarkis yang sedemikian rigid sebagaimana bahasa Jawa, ada tingkatan kromo, madyo dan ngoko. Hal ini tampak pada rumah tangga masyarakat Banyuwangi. Posisi suami sama dengan isteri selaku kepala keluarga dan profesinya dianggap sebagai sama-sama bekerja. Komunikasi antara suami dan isteri tampak sangat lugas, namun untuk penghormatan terhadap yang lebih tua masyarakat Banyuwangi tetap memakai bahasa yang *hirarkis*, dengan masing-masing memanggil dengan bahasa komunikasi sederhana dalam tegur sapa dialog *ndiko* (halus), *riko* (menengah) atau *iro* (kasar), tanpa ada aturan untuk memakai bahasa yang halus saja. Demikian juga, hubungan antara *kakang/ucak* (kakak/ lebih tua) dan *tholek* adik/ yang lebih muda) laki-laki dengan laki-laki, *embok* (kakak

perempuan / lebih tua) *beng* (adik/ yang lebih muda) perempuan dengan perempuan. Dalam komunikasi kakang dan tholik. Kakang memanggil adiknya cukup dengan *lek*, cukup dengan menyebut ujung namanya (semisal Mahrus, cukup dipanggil *lek*). Begitu juga sebaliknya, adik tidak harus memanggil nama lengkap kakaknya, cukup menyebut ujung namanya saja (semisal Fauzi, cukup dipanggil *kangjik / cakjik*).

Selanjutnya, tercatat dalam sejarah Banyuwangi pada masa pemerintahan Belanda yang menjadi Tokoh dari kalangan Islam tidak saja lelaki, melainkan juga perempuan. Ketika itu hidup ulama besar Syekh Muhammad sholeh (Kiai Saleh), Syekh Muhammad Syamsuri (mbah Surik) Syekh Abbas (Mbah Abbas) KH. Dimiyati (Mbah Dim), Syekh Adro'i (Kiai Do'i) didampingi ulama besar perempuan nyai Halimah (Mbah Halimah), Nyai Muawwanah (Mak Ana), Nyai Mudzdalifah (Mbah Daipuk) dan Nyai Fatimah (Mbah Patimuk).

Melihat kenyataan sosial dan budaya semacam ini, sangat menarik pembahasan Syekh Muhammad Syamsuri (Mbah Surik) ketika membahas tentang konsep *harta* dalam hukum *faraid*. Daya tariknya adalah nilai-nilai persamaan yang sangat kental dalam pemikirannya yang hidup jauh sebelum wacana ini berkembang dengan baik. Di tangannya, fiqh *faraid* yang selama ini sangat bias perempuan, justru mampu memperlihatkan semangat *egalitarianisme*. Keegaliterianan pemikirannya ini dalam menetapkan hukum *faraid* tersebut sesungguhnya disinyalir banyak pihak sebagai bentuk dari salah satu sikapnya yang sangat akomodatif terhadap budaya lokal yang sudah sangat kuat mengakar.

Meskipun kitab fiqh *faraid* versi Mbah Surik ini, baik naskah asli maupun salinannya atau yang sudah dicetak belum ditemukan. Ada yang mengatakan bahwa naskah aslinya berada di tangan salah seorang keturunannya yang bernama Syekh Kamuli Syamsuri yang pernah menjabat Kepala Urusan Masyarakat Banyuwangi Kota. Namun demikian, pemikiran Mbah Surik dalam kitab tersebut tentang harta dan *ishlah* telah mengakar kuat dalam masyarakat Banyuwangi. Tradisi hidup (*living tradition*) hasil buah pemikirannya yang berdialektika dengan realitas sosial dan budaya masyarakat

setempat ini mampu menjadi ketentuan selama berabad-abad masyarakat Banyuwangi dalam pembagian harta warisan.

Ada dua hal yang dikemukakan dalam kitab itu, yang berbeda dengan ketentuan fiqh konvensional. Pertama, istilah harta (harta bersama) ini lahir sebagai buah pemikiran Mbah Surik dalam melihat perbedaan kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat Banyuwangi. Di kalangan masyarakat Arab, memang perempuan sama sekali tidak bekerja untuk memperoleh harta. Karena itu kalau suaminya meninggal dan suami mempunyai anak, si isteri hanya mendapat seperdelapan dari harta warisan. Sementara kalau suaminya tidak meninggalkan anak, maka bagian isteri menjadi seperempat. Pembagian yang seperti ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Namun dalam masyarakat Banyuwangi, umumnya isteri bekerja bersama-sama dengan suami. Oleh karenanya, harta yang didapat selama masih sebagai suami isteri dinamakan *bondo bareng* atau harta bersama. Kalau salah satu pihak meninggal dunia, maka yang masih hidup lebih dahulu mengambil 50% dari hartanya, dan sisanya baru dibagi sesuai dengan ketentuan faraid. Ini jelas merupakan pengembangan yang radikal dari konsep semula, hukum waris Islam, yaitu keseluruhan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dibagi antara ahli waris.

Kemudian dalam membagi harta warisan yang sudah disisihkan dari harta bareng, mbah Surik memakai mekanisme *ishlah*. *Ishlah* artinya permufakatan antara ahli-ahli waris untuk menyerahkan sebagian yang semestinya diterima salah satu ahli waris, diserahkan kepada ahli waris lainnya yang menerima lebih kecil. Contohnya satu orang saudara laki-laki dengan dua orang saudara perempuan. Kalau jumlah harta warisan tersebut Rp 1.000.000, maka bagian saudara perempuan masing-masing Rp 250.000, sementara bagian saudara laki-laki adalah Rp 500.000. Setelah masing-masing pihak mengetahui bagiannya sesuai dengan hukum faraid, lalu mereka bersepakat bahwa saudara laki-laki memberikan sebagian dari yang diterimanya kepada kedua orang saudara perempuannya sehingga jumlah yang mereka sama. Pengembangan hukum waris semacam ini jelas disemangati oleh persamaan derajat antara lelaki dan perempuan. Pemikiran mbah Surik ini hampir mirip dengan konsep mantan menteri masyarakat

Dr. H. Munawir Sadzali yang pernah mereaktualisasi hukum-hukum Islam terutama dalam bidang pembagian harta waris. Karakter masyarakat Banyuwangi yang mengedepankan persamaan ini pernah diungkap oleh budayawan Banyuwangi Hasnan Singodimayan yang mengatakan bahwa orang Banyuwangi itu mempunyai karakter *Bingkak* (tidak mengenal kelas sosial dalam bergaul), *Aclak* (suka meremehkan / memudahkan masalah) dan *Ladyak* (mempunyai semangat pemberani dalam menghadapi tantangan dan terkesan tanpa perhitungan yang matang).

4. Tradisi Kebebasan

Sejak kecil anak Banyuwangi sudah dilatih dan dididik orang tuanya untuk bebas memilih jalan hidupnya masing-masing agar cepat mandiri. Hal ini terkait erat dengan budaya dagang masyarakat Banyuwangi yang sedemikian kuat. Sudah barang tentu kebebasan yang dimaksud lebih pada bidang ekonomi. Ada yang diajak berdagang kecil-kecilan, sekedar membantu orang tuanya berjualan, belajar kerja serabutan dengan memperoleh imbalan seadanya, diwanti-wanti perihal seluk-beluk berdagang atau mau meneruskan sekolah sepuas-puasnya. Bagi orang Banyuwangi yang penting bukan mau berdagang atau mau sekolah, melainkan bagaimana secepat mungkin melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan segera bebas, mandiri dan merdeka.

D. Upaya Masyarakat Multikultural Banyuwangi Dalam Menciptakan Kerukunan

Upaya menciptakan kerukunan masyarakat yang multikultur dimulai dengan melakukan “dialog bersama” dan berpegangan pada pedoman etika yang menjadi kesepakatan bersama sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini sangat membantu upaya-upaya kerukunan masyarakat secara komprehensif.

Upaya-upaya tersebut diatas tidak akan mungkin dapat dilaksanakan bila pemerintah daerah dalam berbagai tingkatnya tidak menginginkannya atau tidak menyетуjuinya. Ketidakinginan merubah tatanan yang ada

biasanya berkaitan dengan berbagai fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh dan dipunyai oleh para pejabat dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada dan pendistribusiannya. Mungkin peraturan yang ada berkenaan dengan itu harus direvisi, termasuk revisi untuk meningkatkan gaji dan pendapatan para pejabat tanpa memandang kelompok atau etnis, sehingga kerukunan masyarakat bisa lestari, hal ini disesuaikan dengan keinginan masyarakat Banyuwangi dalam mencegah terulangnya kembali peristiwa yang memilukan, akan tetapi keinginan perlu dibrikan semangat penguatan dalam pelaksanaannya dikarenakan masyarakat Banyuwangi masih mengalami trauma berat terhadap peristiwa yang pernah mereka alami, maka ada baiknya kerukunan sosial masyarakat yang beranekaragam digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses *kuratif* masyarakat ini sebaiknya dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat *primordial* dan secara bertahap memasuki masyarakat Banyuwangi yang multikultural. Sebagai model maka masyarakat Banyuwangi yang multikultural adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau *bhinneka tunggal ika* yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Banyuwangi pada tingkat nasional dan lokal.

Selanjutnya, suatu dialog akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila, paling tidak, memenuhi hal-hal berikut ini. *Pertama*, adanya keterbukaan atau transparansi. Terbuka berarti mau mendengarkan semua pihak secara proporsional, adil dan setara. Dialog bukanlah tempat untuk memenangkan suatu urusan atau perkara, juga bukan tempat untuk menyelundupkan berbagai “agenda yang tersembunyi” yang tidak diketahui dengan partner dialog.

Kedua adalah menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada “truth claim” dari salah satu pihak. Masing-masing pihak diperlakukan secara sama dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran masyarakatnya (Tarmizi Thaher, 1999 : 2-3).

Ketiga adalah sikap kritis, yakni kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendiskreditkan orang lain. Dengan kata lain, dialog ibarat pedang bermata dua; sisi pertama

mengarah pada diri sendiri atau otokritik, dan sisi kedua mengarah pada suatu percakapan kritis yang sifatnya eksternal, yaitu untuk saling memberikan pertimbangan serta memberikan pendapat kepada orang lain berdasarkan keyakinannya sendiri. Masyarakat bisa berfungsi sebagai kritik, artinya kritik pada pemahaman dan perilaku umat bermasyarakat sendiri (Qomarudin Hidayat, tt : 42).

Keempat adalah adanya persamaan. Suatu dialog tidak dapat berlangsung dengan sukses apabila satu pihak menjadi “tuan rumah” sedangkan lainnya menjadi “tamu yang diundang”. Tiap-tiap pihak hendaknya merasa menjadi tuan rumah. Tiap-tiap pihak hendaknya bebas berbicara dari hatinya, sekaligus membebaskan dari beban: misalnya kewajiban terhadap pihak lainnya, maupun kesediaannya pada organisasinya dan pemerintahannya. Suatu dialog hendaknya tidak ada “tangan di atas” dan “tangan di bawah”, semuanya harus sama (Ismail Raji al-Faruqi, 1994 : 12).

Kelima, adalah ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol masyarakat dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha melakukan itu agar pemahaman terhadap orang lain tidak hanya di permukaan saja tetapi bisa sampai pada bagiannya yang paling dalam (batin). Dari situlah bisa ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai, meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri (St. Sunardi, tt : 76).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Potret sosio-kultural masyarakat yang mendiami wilayah Banyuwangi adalah kombinasi masyarakat saling berinteraksi dengan banyak etnis, suku, golongan, masyarakat, aliran, kelompok dan seterusnya yang pada akhirnya melahirkan masyarakat multikultur. Perpaduan dan adaptasi budaya ini lebih banyak berlangsung di pusat dan pinggiran kota, interaksi antara warga Madura, Bali, Cina, Arab, Mandar, Melayu, Jawa dan Osing melahirkan sebuah kerukunan yang mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri. Dalam konteks kesenian, juga terjadi proses perpaduan dan lebih cenderung berorientasi pada kesenian berakar dari budaya campuran, misalnya, ada

kelompok "*Hadrah Kuntul*" yang dalam pertunjukannya menggunakan Bahasa Arab yang komunitas penontonnya berasal dari etnis Osing, Bali, Cina, Madura dan Jawa. Pada umumnya, budaya Banyuwangi merupakan hasil dari suatu proses sosial panjang dan dialog intensif di antara bermacam-macam kebudayaan sejalan dengan masyarakat pendukungnya.

2. Kearifan lokal masyarakat Banyuwangi dalam membangun keakraban antar masyarakat untuk menyelesaikan problema masyarakat adalah munculnya fenomena sosiologis tentang nilai-nilai demokrasi dalam budaya Banyuwangi, hal dapat dilihat dari beberapa bentuk tradisi yang dilakukan masyarakat Banyuwangi, di antaranya: Tradisi Musyawarah, Tradisi Gotong Royong, Tradisi Persamaan dan Tradisi Kebebasan. Selain itu ada beberapa tradisi masyarakat Banyuwangi dalam bentuk partisipasi sosial kemasyarakatan, antara lain : Tradisi Pelestarian Sumber Daya Alam, Tradisi Pemeliharaan Keamanan Lingkungan, Tradisi Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan sebagai Komunitas, Tradisi Pemeliharaan Ketertiban Sosial dan Tradisi Pemeliharaan Identitas Komunitas.
3. Upaya menciptakan kerukunan masyarakat yang multikultur dilakukan dengan "dialog bersama" dan berpegangan pada pedoman etika yang menjadi kesepakatan bersama sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral, dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini sangat membantu upaya-upaya kerukunan masyarakat secara komprehensif. Pedoman etika ini antara lain : *Pertama*, adanya keterbukaan atau transparansi. *Kedua*, menyadari adanya perbedaan. *Ketiga*, adanya sikap kritis terhadap hal-hal yang mengganggu kerukunan masyarakat, *Keempat*, adanya persamaan hak dan kewajiban dan *Kelima*, adanya kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol masyarakat dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Hasil dari adanya kerukunan masyarakat Banyuwangi yang dibangun dengan pendekatan multikultural ini antara lain : *Pertama*, adanya perpaduan kebudayaan masing-masing etnis di Banyuwangi yang menghasilkan sebuah budaya yang 'benar-benar baru'. *Kedua*, adanya kolaborasi dan atraksi kultural dari masing-masing etnis dengan suasana yang semakin dinamis karena datangnya etnis-etnis lain dari seluruh bagian Indonesia. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika masyarakat Banyuwangi yang multikultur ini hancur karena sengaja dipecah oleh mereka yang mengatasnamakan kebenaran

demi kepentingan politik, agama, etnis, kelompok, golongan, ekonomi, ataupun perut.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah sebagai upaya mencegah terulangnya kembali peristiwa berdarah yang pernah dialami oleh masyarakat Banyuwangi di masa yang akan datang.
2. Bagi Masyarakat Banyuwangi : Hendaknya ikatan kebersamaan masyarakat Banyuwangi saat ini tetap dipertahankan, karena sangat mungkin ikatan kebersamaan masyarakat Banyuwangi ini melemah dikarenakan baerbagai faktor, antara lain : pertama, adanya gejala *primordialisme* di berbagai daerah baik karena alasan ekonomis maupun non-ekonomis, kedua, munculnya berbagai fenomena menguatnya nilai-nilai *sektarian* yang berbasis pada keluarga dan kelompok etnis. Ketiga, adanya konflik dan perpecahan yang dilatarbelakangi ideologi, etnisitas, ekonomi, politik, hukum, dan militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Andito (ed.) 1998, *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah,)
- Andrew Beatty, "Adam and Eve and Vishnu: Syncretism in The Javanese Slametan" dalam *The Journal of the Royal Anthropological institut* 2 (June 1996).
- Andrew Beatty, 2001, *Variasi Agama di Jawa , Suatu Pendekatan Antropologi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Bachtiar Effendi, 2002 “Menyoal Multikulturalisme di Indonesia” dalam *Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris*, ed. Raja Juli Antoni (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bassam Tibi, “Moralitas Internasional sebagai Landasan Lintas Budaya”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Pelda Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1996)
- Bertens, K., 2001, *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Clifford Geertz, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta : Pustaka Jaya
- Data [www. Banyuwangi.go.id](http://www.Banyuwangi.go.id)
- Departemen Agama RI. 2002. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Masyarakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Masyarakat.
- Fay, Brian, 1996, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell
- Glazer, Nathan, 1997, *We Are All Multiculturalists Now*. Cambridge, Mass.:Harvard University Press.
- Harahap, Syahrin. 1997. *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hassan Hanafi, 1977 *Religious Dialogue & Revolution, Essay on Judaism, Christianity & Islam* (Cairo: The Anglo Egyptian Bookshop).
- Ismail Raji al-Faruqi (ed.) 1994, *Triadlog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*, alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I (Surabaya : Pustaka Progressif), hlm. 12.

- Komaruddin Hidayat, "Lingkup dan Metodologi Studi Agama-Agama", hlm. 42. Kompas (5/ 8, 2000).
- Lexy J. Moleong, 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Lubis, HM. Ridwan, dkk. (eds.) *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Masyarakat*. (Bandung: LPKUB Medan dan Ciptapustaka Media Bandung.
- Ma'arif, Syafii. A. 1997. *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.